

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP
(STUDI PADA KELURAHAN MENTENG DAERAH
JAKARTA PUSAT)**

Disusun Oleh:

Nama : Fatimatuzzahra

NPM : 2013011028

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP (STUDI PADA KELURAHAN MENTENG DAERAH JAKARTA PUSAT)

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Terapan

Oleh:

Nama : Fatimatuzzahra

NPM : 2013011028

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Nama : Fatimatuzzahra

NPM : 2013011028

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Judul : Efektivitas Pengelolaan Aset Tetap (Studi Pada Kelurahan
Menteng Daerah Jakarta Pusat)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada, 2 Agustus 2024

Dosen Pembimbing



Nila Kurnia Wati, SAP., MAP.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAR PENGESAHAN

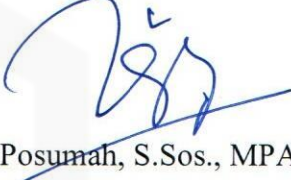
Diperiksa dan disahkan oleh Tim Pengui Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Poiteknik STIA LAN Jakarta pada

Ketua Merangkap Anggota



(Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd)

Sekretaris Merangkap Anggota



(Rizky Yustiani Posumah, S.Sos., MPA.)

Anggota



(Nila Kurnia Wati, SAP., MAP.)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimatuzzahra

NPM : 2013011028

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian tugas akhir yang telah penulis susun dengan judul “*EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP (STUDI PADA KELURAHAN MENTENG DAERAH JAKARTA PUSAT)*” merupakan hasil penelitian sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penelitian tugas akhir ini merupakan hasil dari plagiat atau penjiplak karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta 11 Juli 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi ini merupakan hasil dari pelaksanaan penelitian di Kelurahan Menteng Daerah Jakarta Pusat. Adapun dalam menyelesaikan skripsi, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari pihak lain. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya oleh Ibu Nila Kurnia Wati, SAP., MAP selaku dosen pembimbing Skripsi. Selain itu peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, selaku direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Bapak Indrawan selaku Lurah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat
3. Seluruh staff Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang telah membantu dalam menghimpun data selama penelitian
4. Orangtua dan Keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung untuk kelancaran selama menempuh pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta
5. Serta teman-teman terutama Dedik Antika Sundari, Ayu Andira, Nisa Cantika Putri Pahlawan, Rahma Afriyati yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan dukungan dari para pembaca untuk memberikan kritik atau saran yang membangun guna dijadikan bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

Jakarta 11 Juli 2024

Peneliti

Fatimatuzzahra

2013011028

ABSTRAK

Fatimatuzzahra, 2013011028

”EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET TETAP (STUDI PADA KELURAHAN MENTENG DAERAH JAKARTA PUSAT)”

Skripsi: x hlm: 84

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan aset tetap di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan aset tetap di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah data. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu (Pasla 2023) dan (Pandu 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Menteng Jakarta Pusat sudah melakukan pengelolaan aset dengan baik akan tetapi dalam pelaporannya masih terjadi ketidaksamaan data antara pengelola barang dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan sumber daya manusia yang belum memadai. Terdapat dua permasalahan yang ada di Kantor kelurahan Menteng Jakarta Pusat yaitu pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang pengelolaan aset. Saat ini jumlah pegawai di kelurahan Menteng Jakarta Pusat dibidang aset sebanyak 3 orang namun tidak terdapat sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dibidang pengelolaan aset karena hanya satu orang saja yang mendapatkan sertifikat keahlian di bidang aset menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan aset, kedua pelaporan aset masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksamaan data antaran pengelola aset di kelurahan Menteng dengan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu pada penelitian ini dalam pengelolaan aset perlu dilakukan penataan agar tercapai nya laporan aset yang baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Aset Tetap, Management Aset

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRACT

Fatimatuzzahra, 2013011028

“EFFECTIVENESS OF FIXED ASSET MANAGEMENT (STUDY IN MENTENG VILLAGE, CENTRAL JAKARTA REGION)”

Final Project:

This study aims to determine and analyze the effectiveness of fixed asset management in Menteng Village, Central Jakarta and to analyze the inhibiting and supporting factors in fixed asset management in Menteng Village, Central Jakarta. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques are carried out through interview techniques, observation, and data review. The theories used in this study are (Pasla 2023) and (Pandu 2021). The results of the study indicate that Menteng Village, Central Jakarta has carried out asset management well, but in its reporting there is still a data discrepancy between the goods manager and the DKI Jakarta Regional Asset Management Agency (BPAD) and inadequate human resources. There are two problems in the Menteng Village Office, Central Jakarta, namely first, the lack of competent human resources in the field of asset management. Currently, the number of employees in Menteng Village, Central Jakarta in the asset sector is 3 people, but there are no human resources who specialize in asset management because only one person has a certificate of expertise in the asset sector, causing asset management to be less than optimal, second, asset reporting has not been carried out properly. This is indicated by the disparity of data between asset managers in Menteng sub-district and the DKI Jakarta Provincial Asset Management Agency. Therefore, in this study, asset management needs to be arranged in order to achieve a good asset report.

Keywords: *Effectiveness, Fixed Asset Management, Asset Management*

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	10
B. Konsep Kunci	26
C. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Metode Penelitian.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	30
C. Instrumen Penelitian.....	32
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Kelurahan Menteng Jakarta Pusat	35
B. Penyajian Data	39
C. Pembahasan.....	60
D. Sintesis Pemecahan Masalah.....	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Data Aset.....	5
Tabel 3.1 <i>Key Informan</i>	25



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Aset.....	11
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Kantor Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.....	30



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.....	73
Lampiran 2 Pedman Wawancara Penelitian <i>Key Informan</i>	74
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	83
Lampiran 4 Transkrip Wawancara.....	86
Lampiran 5 Transkrip Wawancara.....	88
Lampiran 6 Transkrip Wawancara.....	95
Lampiran 7 Surat Pengantar Penelitian.....	102
Lampiran 8 Surat Selesai Penelitian.....	103
Lampiran 10 Hasil Turnitin.....	104
Lampiran 11 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	105
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	106

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dilaksanakan dengan harapan pembangunan yang menyeluruh, dimana setiap daerah berkewajiban mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015. Penyelesaian keuangan yang adil, profesional dan transparan antar pemerintah, berdasarkan prinsip pemerintahan mandiri yang benar dan bertanggung jawab yang menjadi salah satu tuntutan di masyarakat. Harapan dari otonomi daerah ialah dapat memberikan kebebasan pembangunan lokal kepada setiap daerah melalui kegiatan yang dapat memperkuat peran aktif masyarakat dalam tiga tugas pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memperkuat masyarakat dan menciptakan ruang partisipasi (partisipasi) dalam proses pembangunan. (Beni 2019) menjelaskan bahwa “Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan khusus nya dalam pengelolaan aset daerah dan keuangan, perubahan tersebut sangat dirasakan pada daerah yang mendapatkan belanja modal yang besar seperti Provinsi, Kabupaten, dan Kota”.

Pemerintah daerah sebagai penentu dalam pembangunan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah mempunyai peran penting dalam mengelola aset daerah. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Manajemen pengelolaan penting dalam pemanfaatan barang milik daerah sehingga dapat melaksanakan prinsip transparansi, efektif serta efisien. Namun pemerintah daerah masih mempunyai

permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu ada nya perlakuan aset yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah pengelolaan aset yaitu banyak nya aset negara berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan dengan baik serta terlantar sehingga seringkali aset negara diokupasi atau diklaim secara sepihak oleh masyarakat. Kurang nya upaya untuk menginventarisasi seluruh potensi aset dengan belum baik nya pencatatan barang milik negara/daerah di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, tersebarnya lokasi serta penguasaan aset negara, belum terpadu nya landasan hukum pengelolaan aset negara, lemahnya pengawasan dan koordinasi terhadap aset negara. Dalam pengelolaan aset pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penilaian, pengamanan, pengapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2021 BPK menemukan permasalahan aset tetap sebesar 32% dan permasalahan piutang sebesar 3% permasalahan tersebut terkait dengan pengamanan, penatausahaan, pemanfaatan, serta pemindahtanganan selain itu pengelolaan aset yang kurang baik juga berpotensi memunculkan perilaku korupsi.

Pengelolaan aset menjadi salah satu ruang yang dapat memunculkan perilaku korupsi dan membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah selain itu jika aset tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan banyak persoalan hingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) pemda kabupaten magelang melakukan tindakan pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 2,06 miliar, beliau merupakan salah satu kepala bidang di badan pengelolaan aset dan keuangan daerah (BPAD) pemda Kabupaten Magelang. Kasus korupsi tersebut dilakukan pada tahun 2017 hingga terungkap pada tahun 2019 dengan meliputi aset seluruh SKPD di pemda, modus yang digunakan yaitu dengan meminjam uang kemudian menjaminkan barang-barang tersebut. Berdasarkan data badan penglolaan aset dan keuangan daerah

(BPAD), aset yang dikorupsi total ada 103 ribu item dan 124 unit kendaraan bermotor.

Pemerintah telah berupaya melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintah untuk memperbaiki pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan kepada masyarakat. Belum terbentuknya efektivitas dalam pengelolaan aset di pemerintah daerah, dalam proses laporan belanja modal masih belum efektif nya pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, efektivitas pengelolaan aset sudah banyak di teliti seperti “*Efectiness of Property Aset Management of Scottich Councils*”. Dilakukan nya penelitian tersebut untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset seperti penggunaan aset property yang efisien dan efektif, serta meningkatkan pengantaran layanan dan hasil dari penelitian tersebut dewan (pemerintah daerah) kurang berhasil dalam menggunakan aset properti secara efisien dan efektif untuk mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun penelitian yang dilakukan dalam negeri seperti “Mengindikasikan adanya hubungan antara implementasi manajemen aset terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah”. (Pasla 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Malawi, dkk (2019) mengenai efektivitas pengelolaan aset properti pada pemerintah Skotlandia menunjukkan bahwa dewan (pemerintah daerah) kurang berhasil dalam menggunakan aset properti secara efisien dan efektif untuk mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Mereka juga tidak berhasil meningkatkan efisien staf, selain itu terdapat permasalahan dalam meningkatkan pemberian layanan karena dewan (pemerintah daerah) kurang berhasil dalam memperkenalkan kerja lintas layanan dan ko-lokasi serta memastikan bahwa properti mudah diakses oleh pengguna namun dewan (pemerintah daerah) telah sangat berhasil dalam memanfaatkan penerimaan modal secara efektif untuk mendukung proyek-proyek modal. Tujuan dari dilakukan penelitian ini untuk menilai efektivitas pengelolaan aset properti operasional di dewan skotlandia dan kriteria yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas

manajemen aset mencakup penggunaan sumber daya modal yang efektif, penggunaan aset properti secara efisien dan efektif, serta peningkatan pemberian layanan.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Indah (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset pemerintah Kota Bandung baik secara administrasi, fisik ataupun hukum belum berjalan secara efektif namun ketidakefektifan pelaksanaan pengamanan aset di pemerintah Kota Bandung masih dapat dipertanggungjawabkan kepada sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lutfi (2015) mengenai “*Asset Management Anallysis of DKI Jakarta Province (A Study on Land Assets in The 2015 Budget Year)*” menunjukkan bahwa masih ada beberapa masalah yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dalam tahapan pengelolaan aset tanah khususnya di inventarisasi aset serta pemantauan sementara ada beberapa aset lain yang tidak diamankan dengan baik secara fisik ataupun administratif dan situasi ini menyebabkan hilang nya beberapa aset yang menyebabkan kerugian keuangan bagi pemerintah daerah, meskipun sistem informasi aset sudah beroperasi saat ini namun masalah terkait kualitas serta kuantitas sumber daya manusia masih menghambat kemajuan dalam pengelolaan aset.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah (2019) mengenai pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kota Jakarta Timur menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan siklus pengelolaan aset daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 walaupun belum semuanya dilakukan secara maksimal seperti keterlambatan SKPD, pemanfaatan barang kepemilikan daerah hanya sebatas penggunaan dan penggunaan jaminan serta pengamanan yang dilakukan BPAD Pemerintah Kota Jakarta timur tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan siklus pengelolaan aset daerah adalah faktor sumber daya manusia, komitmen pimpinan, dan faktor penilaian aset tetap.

Manajemen aset daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Pengelolaan aset di pemerintah daerah tidak hanya berupa aset yang di miliki oleh pemerintah daerah saja melainkan juga aset pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan, jalan, irigasi. Penyediaan aset daerah dilakukan untuk menunjang perekonomian daerah seperti pembangunan infrastruktur. Setiap daerah diberikan kesempatan untuk mengelola, membangun, mengembangkan daerah nya berdasarkan kebutuhan yang ada. Pemerintah daerah selaku pemegang berbagai kewenangan dalam mengelola daerah nya perlu ada nya kesiapan pada berbagai aspek seperti menyediakan media yang tepat dalam melakukan pengelolaan aset daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah ialah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pemindahtanganan, pemusnahan penatausahaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan. (Beni 2019).

Manajemen aset termasuk seni serta ilmu yang mencakup berbagai proses dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki seperti merencanakan, menilai, memelihara, mengoperasikan, membaharui, menghapuskan aset, inventarisasi serta legal audit (Pasla 2023). Aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, tanah, seta jaringan, aset lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui apabila mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, diperoleh dengan tujuan untuk digunakan, dan biaya perolehan nya dapat di ukur secara andal. Oleh karena itu, ruang lingkup pengelolaan aset tetap/barang milik daerah (aset lokal) meliputi perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, keamanan dan pemeliharaan, evaluasi, penatausahaan, pemindahtanganan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian. (Beni 2019)

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus berdasarkan prinsip akuntabilitas publik meliputi *accountability for probity and legality* (akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum), *process accountability* (akuntabilitas proses), dan *policy accountability* (akuntabilitas kebijakan). Oleh karena itu, dalam pengelolaan aset perlu dilakukan penataan agar tercapai nya laporan aset yang baik. Secara umum aset merupakan suatu barang yang memiliki nilai tukar ekonomi, memiliki nilai komersil, dan nilai tukar yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah atau perorangan dalam meningkatkan pelayanan serta memajukan organisasi yang dikelola. Standar pada pengelolaan aset mempunyai siklus manajemen aset yang mempertimbangkan strategi manajemen sebagai bagian aset masa pakai mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset, tujuan nya untuk mencari biaya terendah dalam jangka panjang pada saat membuat keputusan dalam manajemen aset. (Pasla 2023)

Unit pengelolaan aset pada suatu daerah sangat berperan dalam pengelolaan ataupun pengadaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok serta fungsi organisasi, oleh karena itu sistem pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara efisien serta efektif dengan menggunakan prinsip transparansi dan perlakuan adil bagi semua pihak agar kemudian hasil nya tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Pemerintah daerah mempunyai tugas yang harus di selesaikan dalam ketidaktertiban administrasi dalam inventarisasi seperti pendataan yang masih kurang cermat, kurang termonitor nya pada pemindahtanganan barang milik daerah/aset salah satunya adalah pemerintah daerah di tingkat Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Salah satu kewenangan dari pemerintah daerah di tingkat Kelurahan adalah melakukan pengelolaan aset tetap (Kementerian Dalam Negeri 2021)

Saat ini masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset tetap di kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti melalui kegiatan magang ditemukan bahwa terdapat dua permasalahan yang ada di Kantor kelurahan Menteng Jakarta Pusat yaitu pertama, kurangnya sumber daya manusia

yang kompeten dibidang pengelolaan aset. Saat ini jumlah pegawai di kelurahan Menteng Jakarta Pusat dibidang aset sebanyak 3 orang, namun hanya 1 orang yang memiliki spesialisasi dibidang pengelolaan aset. Hal ini menyebabkan tidak maksimal nya pengelolaan aset di kelurahan Menteng Jakarta. Kedua, pelaporan aset masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini diunjukkan dengan ketidaksamaan data antara pengelola aset di kelurahan Menteng dengan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Golongan	Instansi	
	Kelurahan	Badan Pengelola Aset Daerah
KIB A	Tanah: 8.403.260.650	Tanah: 8.303.240.690
KIB B	Peralatan dan Mesin 2.000.564.581	Peralatan dan Mesin 1.000.764.585
KIB C	Gedung dan Bangunan: 4.365.729.200	Gedung dan Bangunan: 4.315.529.000
KIB D	Jaringan, irigasi, jaringan: Tidak ada	-
KIB E	Aset Tetap Lainnya: Tidak ada	-
KIB F	Konstruksi Dalam Pengerjaan: Tidak ada	-
KIB G	Ekstrakomtabel: 93.169.000	Ekstrakomtabel: 90.064.000
KIB J	Aset Rusak Berat: 488.583.883	Aset Rusak Berat: 436.180.833

Sumber Data Aset Kelurahan Menteng Jakarta Pusat

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara kelurahan Menteng dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dimana pada KIB A di Kelurahan Menteng jumlah Tanah sebanyak 8.403.260.650 sedangkan di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) jumlah Tanah sebanyak 8.303.240.690, KIB B di Kelurahan Menteng jumlah Peralatan dan Mesin sebanyak 2.000.564.581 sedangkan di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) jumlah Peralatan dan Mesin sebanyak 1.000.764.585, KIB C di Kelurahan Menteng jumlah Gedung dan

Bangunan sebanyak 4.365.729.200 sedangkan di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) jumlah Gedung dan Bangunan sebanyak 4.315.529.000, KIB G di Kelurahan Menteng jumlah Ekstrakomtabel sebanyak 93.169.000 sedangkan di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) jumlah Ekstrakomtabel sebanyak 90.064.000, dan KIB J di Kelurahan Menteng jumlah Aset Rusak Berat sebanyak 488.583.883 sedangkan di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) jumlah Aset Rusak Berat sebanyak 436.180.833.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas pengelolaan aset tetap di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelola aset yang ada di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan aset tetap di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan untuk

1. Mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan aset yang ada di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat
2. Mengetahui serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan aset tetap di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka diharapkan mampu memberikan wawasan serta dapat diterima bagi seluruh pihak yang berkaitan, baik secara langsung atau tidak langsung pada tulisan ini. Adapun manfaat dari penellitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Akademis:

- a. Sebagai bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan khususnya pada topik efektivitas pengelolaan aset tetap
- b. Manambah wawasan mengenai pengelolaan aset tetap

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi serta masukan mengenai efektifitas pengelolaan aset tetap yang ada di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat.

- b. Bagi Penulis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penulis mengenai pengelolaan aset tetap dan dijadikan sarana dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama dibangku perkuliahan.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**